



PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, Fax. (0778) 461349

Website : www.batamkota.go.id

email : kominfo@batam.go.id

BATAM

Kode Pos : 29464

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 534).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2017 yang tercantum dalam lampiran I yang diketahui oleh Walikota Batam merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 23 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID KOTA BATAM**



H. JEFRIDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199802 1 006

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2017**

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 bulan Desember tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	KONSEKUENSI MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	OPD
1	Biodata Elektronik ASN (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
2	Dokumen/Berkas/Arsip ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
3	Daftar Nilai SKP ASN	1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian 2. PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN	2 Tahun	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
4	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset dan Pendapatan/rekening Bank ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
5	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
6	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD

7	Data Usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan Pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Data rekam medis pasien (ASN) dan atau Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
9	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
10	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 3. Perpres 54 tahun 2010	Selama Proses Pengadaan barang/jasa	Merugikan proses penyusunan kebijakan Karena adanya pengungkapan secara system (informasi apabila menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran Karena diperoleh penawaran yang wajar	Seluruh OPD
11	Dokumen Penawaran Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses Pengadaan barang/jasa.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Seluruh OPD

		2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Tidak terbatas			
12	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindak Pengerusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Dinas Kominfo
13	Internet Protokol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Dinas Kominfo
14	Bandwith Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Menjaga/ melindungi hak akses	Dinas Kominfo
15	Kode akses Elektronik dan user/ password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan	Seluruh OPD
16	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menajaga keamanan database	Seluruh OPD
17	Sistem Management Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menajaga keamanan database	Seluruh OPD
18	Hasil : 1. Pemeriksaan, 2. Pemeriksaan kasus, 3. Pemeriksaan khusus,	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf c ayat 6 dan Pasal 17 huruf l, 2. Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008	Tidak Terbatas	1. Menghambat kesuksesan kebijakan Karena adanya	Membantu badan system dalam menentukan dan mencapai keberhasilan	Inspektorat

	<p>4. Review laporan keuangan,</p> <p>5. Evaluasi/Pemantauan</p> <p>6. Naskah hasil pemeriksaan NHP,</p> <p>7. Kertas Kerja Audit (KKA)/ Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)</p>	<p>tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2007 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah bab/no.4500</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I bab Norma pelaporan huruf a.</p> <p>4. Permendagri 51 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemda</p>		<p>pengungkapan secara system</p> <p>2. Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP</p> <p>3. Melanggar peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP</p> <p>4. Akan terjadi kesalahpahaman penerima informasi dengan sumber informasi apabila temuan-temuan tersebut belum ditindaklanjuti</p>	<p>pelaksanaan kebijakan</p>	
19	<p>Identitas saksi,saksi pelapor, korban, keluarga dan/atau pihak yang terkait dan kondisi kesehatan korban/pasien/klien tindak kekerasan dalam rumah tangga yang melapor</p>	<p>UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Uu no 31 tahun 2014</p> <p>Pasal 5 ayat 1 poin a dan i</p> <p>Uu no 36 tahun 2009 pasal 57 ayat 1</p>	Tidak Terbatas	<p>Mengungkapkan kerahasiaan korban pelapor terhadap pelaku tindak kekerasan</p>	<p>Melindungi dan mengamankan korban</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB</p>
20	<p>Data Identitas Keluarga Hasil pendataan keluarga dalam bentuk basis data keluarga Indonesia</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j,</p> <p>2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE</p>	Tidak Terbatas	<p>Mengungkapkan data keluarga dan masalahnya yang bersifat pribadi</p>	<p>Melindungi Identitas keluarga yang dapat dipergunakan oleh pihak lain</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB</p>

21	Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang ASN (Hasil test, Assesment, Psikotest)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. Kode etik Psikologi	Tidak Terbatas	Menilai Opini tentang orang lain	Akan memberikan keleluasaan untuk mengevaluasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kapabilitas seseorang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan nonformal ASN (Hasil diklat)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Melindungi hak pribadi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Arsip Digital data Pribadi Permohonan Izin meliputi : a. KTP permohonan izin (namanya dibuka); b. PBB tahun terakhir; c. NPWP pribadi; d. Surat bukti pemilikan tanah; e. Akta notaris.	1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 26 dan pasal 32 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Melindungi hak pribadi	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2. Kecamatan se Kota Batam 3. Kelurahan se Kota Batam
24	Arsip Digital Data Perusahaan permohonan izin meliputi : a. KTP pimpinan/ direktur/ pemilik (namanya dibuka) b. Nomor Pokok Wajib Pajak dan PKP pengusaha kena pajak	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan	1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2. Kecamatan se Kota Batam 3. Kelurahan se Kota Batam

	<p>c. Akta pendirian perusahaan (Nomornya dibuka)</p> <p>d. Ijazah dan KTP penanggung jawab bidang teknik</p> <p>e. Surat pengesahan kehakiman/ pendaftaran pengadilan negeri (Nomornya dan nama dibuka)</p> <p>f. Gambar lokasi tepat usaha/ Gudang</p> <p>g. Gambar situasi/ system rencana konstruksi</p> <p>h. Gambar/ denah tempat usaha</p> <p>i. Sertifikat tanah, akte jual beli, sewa tanah pernyataan pemilik</p>					
25	<p>Arsip Digital Data Pribadi Permohonan Izin meliputi :</p> <p>a. Gambar alokasi</p> <p>b. Gambar rencana</p> <p>c. Gambar denah</p> <p>d. Gambar Instalasi listrik, air minum, air kotor, dsb</p> <p>e. Gambar konstruksi</p> <p>f. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p>	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat 1 huruf h</p>	Tidak Terbatas	Karena berpotensi membuka informasi pribadi	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia dari persaingan usaha yang tidak sehat atau penipuan	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>2. Kecamatan se Kota Batam</p> <p>3. Kelurahan se Kota Batam</p>

	<p>g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun</p> <p>h. Peta Lokasi</p> <p>i. Peta penggunaan detail tanah</p> <p>j. Peta tata ruang lokasi</p> <p>k. Peta site plan/ blok plan</p> <p>l. Rencana tahapan pembangunan</p> <p>m. Photo lokasi</p> <p>n. Izin lain yang dipersyaratkan</p> <p>o. Surat rekomendasi</p>					
26	<p>Database perizinan meliputi :</p> <p>a. Nama dan alamat pimpinan</p> <p>b. Jumlah yang akan dibayarkan</p>	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b</p>	Tidak Terbatas	Membuka informasi pribadi	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>2. Kecamatan se Kota Batam</p> <p>3. Kelurahan se Kota Batam</p>
27	<p>Arsip Digital Data perusahaan permohonan izin meliputi :</p> <p>1. Gangguan/HO,</p> <p>2. Tanda daftar perusahaan,</p> <p>3. Tanda daftar Gudang,</p> <p>4. Usaha perdagangan,</p> <p>5. Usaha industri,</p> <p>6. Tanda daftar industry,</p> <p>7. Usaha jasa konstruksi,</p>	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 26 dan Pasal 32</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan pasal 16 huruf b</p>	Tidak Terbatas	Membuka informasi pribadi	Melindungi/ mengamankan data pribadi yang bersifat rahasia	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>2. Kecamatan se Kota Batam</p> <p>3. Kelurahan se Kota Batam</p>

<p>8. Izin mendirikan bangunan, 9. Izin lokasi, 10. Penggalan ruang milik jalan, 11. Pembuatan jalan masuk pekarangan, 12. Penutupan/ penggunaan trotoar, berm, saluran, 13. Pematangan lahan atau tanah, 14. Pembuatan jalan masuk di kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya 15. Pemanfaatan titik tiang pancang reklame, 16. Reklame, 17. Penyelenggaraan angkutan trayek, 18. Pengelolaan temoat parkir, 19. Usaha angkutan, 20. Jasa titipan, 21. Pembuangan air buangan ke sumber air, 22. Pengelolaan air bawah tanah, 23. Pengambilan air permukaan,</p>					
---	--	--	--	--	--

	24. Perubahan alur, bentuk, dimensi dan kemiringan dasar sungai/ saluran, 25. Pembangunan lintasan yang berada di bawah/ di atasnya, 26. Pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sampadan sungai, 27. Pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya					
28	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Seluruh OPD
29	Biodata TKA (Tenaga Kerja Asing)	Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2013	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi TKA yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan	Dinas Tenaga Kerja
30	Berita Acara Pemeriksaan	UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 1 angka 2	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Seluruh OPD
31	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	1. Pasal 79 ayat 1, pasal 95A UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Pasal 83 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang	Sampai dengan terbitnya izin dari Walikota	1. penyalahgunaan data kependudukan 2. Mengungkapkan data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya	1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan 2. Terjaga kerahasiaan data pribadi penduduk	1. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 2. Kecamatan se Kota Batam 3. Kelurahan se Kota Batam

		Administrasi kependudukan 3. Pasal 59 sd 64 Permendagri No 25 tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan system informasi administrasi kependudukan				
32	User/ Password SIPKD Keuangan, TEPRA, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), KTP, E-KTP, Aplikasi BOS, PPDB, dan SIRUP	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan dan privasi computer	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinas Kominfo 4. BAPELITBANG 5. Dinas Pendidikan
33	SPJ/ alat bukti Pertanggungjawaban Keuangan akan tetapi yang dapat dibuka adalah laporan hasil pemerisakaan BPK yang diserahkan ke legislatif	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2014 3. PP No. 70 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013	Tidak Terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan ketidakpastian Hukum	Menjaga informasi mengenai SPJ/ Alat bukti pertanggungjawaban keuangan pada DPPA pada kecamatan	Seluruh OPD
34	Data Pemohon KTP dan KK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf permendagri no 61 tahun 2015	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi masyarakat	1. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 2. Kecamatan se Kota Batam 3. Kelurahan se Kota Batam

35	Data Individu Client HIV	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal. 57 2. PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 3. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39 4. PMK no. 21 tahun 2013 tentang Penganggulangan HIV dan AIDS pasal 21 	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Embung Fatimah
36	Data Individu Pasien TB	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal. 57 2. PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 3. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39 	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Embung Fatimah
37	Data Pribadi Kusta	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesakitan Pasal. 57 2. PMK No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 6-14 3. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 38-39 	Tak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi Klien dapat terjadi Stigma dan Diskriminasi	Melindungi data pribadi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Embung Fatimah
38	Daftar Nama Siswa, Biodata, Kondisi Ekonomi, sosial (terlibat dalam proses hukum), Nilai akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU No. 23 tentang Perlindungan Anak 	Dikecualikan sampai ada izin dari Wali siswa	Mengungkapkan data pribadi dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal, membuka akses penyalahgunaan	Keselamatan siswa dari upaya kriminal dan penyalahgunaan lainnya dapat dihindari	Dinas Pendidikan

				data informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat membuka akses kejahatan sosial		
39	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh Auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf i	Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga iklim kondusif di lingkungan sekolah SKPD dan Pemerintah Kota	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Pendidikan
40	Hasil : Laporan Sementara hasil pemeriksaan SPI (Satuan Pengawasan Intern), dan Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf i. Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No PEWR/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern Pemerintah, bab/no.4500	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature, Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP, Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LH	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Inspektorat

41	Register SP2D ditutup akan tetapi Dapat dibuka kalau yang meminta informasi kompeten dalam bidangnya	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
42	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i. 2. Undang undang 15 tahun 2004 pasal 19	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Pendidikan
43	Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit	Permenkes No. 269/ Menkes/Per/III/2008 BAB IV Penyimpanan, Pemusnahan dan Kerahasiaan (Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11)	Tidak Terbatas	Kesalahfahaman pasien/ keluarga terhadap tindakan atau pengobatan terhadap pasien karena menggunakan bahasa medis, kesalahfahaman ini sering berujung pada gugatan malpraktek	Menjaga kerahasiaan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Embung Fatimah
44	Data Rekam Medis Pasien di Puskesmas	UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP Pasal 6 ayat (17) huruf h	Tidak Terbatas	Pengungkapan Data Pribadi/ penyakit seseorang/ ASN	Menjaga kerahasiaan	Dinas Kesehatan
45	Pembayaran Pajak yang Dilakukan oleh masing masing WP	1. UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak 2. Perda No. 20 Tahun 2012 Bab 10 Pasal 83	Tidak Terbatas	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data WP yang bersifat Rahasia	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
46	Sistem Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Kerahasiaan system persandian	Dinas Kominfo
47	Dokumen Kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan j	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD

		2. PP No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya (Akan Ditambahkan)				
48	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam	UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17	Sampai peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang Kota Batam disahkan	Akan memberikan informasi rencana kota yang simpang siur sebab selama proses legalisasi peraturan daerah, substansi peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang belum bersifat pasti	Menjaga Iklim kondusif di Kota Batam	Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah
49	Berkas-berkas / data data terkait dengan tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses perkara di pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang sudah final dan berkekuatan hukum tetap pada tingkat akhir	Mempengaruhi proses perkara	Melindungi data yang masih berproses dalam pengadilan sampai tingkat akhir	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Pendidikan
50	Data surat perintah penyegelan yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Seluruh OPD
51	Data surat perintah pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan bangunan yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
52	Dokumen teknis IMB	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

				tidak bertanggung jawab		
53	Dokumen pendataan bangunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2. Dinas Pendidikan
54	Dokumen rincian bangunan terkena proyek penghapusan milik pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Seluruh OPD
55	Dokumen Pertelaan Bangunan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
56	Dokumen hasil penilaian terhadap asset pemerintah yang akan dihapuskan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Dapat melindungi data pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
57	Dokumen hasil verifikasi SLF (sertifikat laik fungsi)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
58	Simpanan berjangka dan Tabungan anggota Koperasi	PP No. 9 Tahun 1995 pasal 15 ayat 1 dan ayat 2	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

59	Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
60	Daftar pinjaman anggota koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak Terbatas	Melanggar prinsip kerahasiaan yang pada akhirnya menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
61	Data Industri	UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 64 ayat 1, 65 ayat 1, pasal 69, pasal 70 ayat 2 dan penjelasan pasal 69	Selama UU No. 03 tahun 2014 berlaku	Dikenai sanksi administratif sesuai pasal 70 ayat 2, menciderai perlindungan hak kekayaan intelektual dan berdampak persaingan usaha tidak sehat	Tidak ada manfaatnya jika dibuka	Dinas Perdagangan dan Perindustriann
62	Arsip keterangan silsilah waris	UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan / penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab	Menjaga informasi keterangan waris mengenai data kepemilikan individu perorangan menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan / keluarga masyarakat	Seluruh OPD
63	Alat Bukti Kasus	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
64	Dokumen penanganan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal	Sampai kasus	Dapat menghambat	Menjaga informasi	Seluruh OPD

	perkara	17	selesai	proses penegakan hukum	untuk kelancaran proses penegakan hukum	
65	Opini Hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
66	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
67	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai kasus selesai	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Seluruh OPD
68	Modul diklat di luar forum pelatihan	Undang undang No. 28 tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
69	Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa	Perpres 54 tahun 2010	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
70	Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta	Perpres 54 tahun 2010	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD

				persaingan usaha tidak sehat		
71	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	Perpres No.04 tahun 2015	Sampai proses selesai	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
72	Inovasi hasil Litbang yang belum mendapatkan hak paten	Undang undang No. 28 tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
73	Rekomendasi teknis Litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Seluruh OPD
74	Kepentingan Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual atas teknologi pertanian	Undang undang No. 28 tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

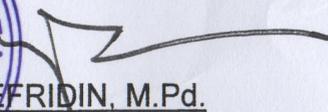
75	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
76	Dokumen Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan PVT)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan dokumen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
77	Titik Koordinat Kampung Tua	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran prose penegakan hukum	Dinas Pertanahan
78	Data dan Informasi menyangkut kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga informasi untuk kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Lingkungan Hidup
79	Data-data perusahaan dikota batam menyangkut pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang bersifat khusus (ketaatan pelaporan izin lingkungan, izin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran prose penegakan hukum	Dinas Lingkungan Hidup

	penyimpanan limbah b3, izin pengelolaan limbah cair)					
80	Hasil analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran prose penegakan hukum	Seluruh OPD
81	Data dan informasi produk perikanan yang terindikasi terkontaminasi dan/atau tercemar oleh zat-zat bahan berbahaya	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai hasil laboratorium keluar	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran prose penegakan hukum	Dinas Perikanan
82	Hasil penelitian Mutu Eksternal (PME) laboratorium kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang	menciptakan iklim investasi yang	Dinas Kesehatan

	laboratorium kesehatan			tidak bertanggung jawab	kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	
83	Hasil visitasi fasilitas pelayanan kesehatan CTKI, laboratorium, klinik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelancaran proses penegakan hukum	Dinas Kesehatan
84	Dokumen hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pelanggaran tata tertib/ kode etik anggota dprd oleh badan kehormatan dprd	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Pp 16 tahun 2010 pasal 61 ayat 4	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan dokumen	Sekretariat DPRD
85	Identitas anggota perpustakaan dan pemustaka	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan yang dirahasiakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu (sebagaimana terlampir) dan telah disetujui oleh Walikota Batam.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU ATASAN PPID KOTA BATAM

 H. JEFRIDIN, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681225 199802 1 006

